



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI WAHYUNINGSIH**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **280839**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **676.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/97 m2 di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 265.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m2/27 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 131.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/72 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **131.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. MOTOR, HONDA CB 150 R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **54.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	201.485.045
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.062.485.045
III. HUTANG	Rp.	388.713.423
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	673.771.622

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.